

## Ritual Ruwatan untuk Kota Yogyakarta



KOMPAS/FERGANA INDRA RIATMOKO

Aktivis Dodo Putra Bangsa melakukan ritual ruwatan di depan Kantor Wali Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, Jumat (5/2). Ritual dilakukan sebagai bentuk kritik atas tetap maraknya pembangunan hotel dan apartemen di kota itu, yang memunculkan bermacam dampak negatif bagi lingkungan sekitar.

# 17 Perusahaan Dihukum

## Terbukti Melakukan Persekongkolan Tender

MEDAN, KOMPAS — Komisi Pengawas Persaingan Usaha menghukum 17 perusahaan membayar denda masing-masing Rp 48 juta hingga Rp 5,7 miliar. Mereka terbukti melakukan persekongkolan tender pembangunan hantaran udara tegangan menengah.

Selain itu, mereka juga terbukti melakukan persekongkolan tender hantaran udara tegangan rendah (HUTR) dan trafo distribusi Unit Pelaksana Konstruksi Listrik Satuannya Konstruksi Listrik Perdesaan Sumatera Utara tahun 2013. Keputusan itu dibacakan dalam Sidang Majelis Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KP-PU) di salah satu hotel di Medan, Jumat (5/2). Sidang dilakukan di hotel karena kantor perwakilan KPPU Medan tidak muat menampung banyaknya terlapor yang hadir dalam persidangan.

Majelis hakim yang terdiri dari Kamser Lumbanraja, Sukarmi, dan Tresna P Soemardi juga melarang mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Sumatera Utara Roland Siahaan mengikuti pelelangan paket pekerjaan hantaran udara tegangan menengah (HUTM), HUTR, dan trafo listrik perdesaan di Sumut selama dua tahun dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Majelis juga merekomendasikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi

dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan saksi administrasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa PT PLN Unit Pelaksana Konstruksi Listrik Sater Perdesaan Sumut Jones Hutasoit serta Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa PT PLN Unit Pelaksana Sater Perdesaan Sumut Binsem Situmorang.

Majelis merekomendasikan agar Kementerian ESDM merencanakan tender dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia yang bersertifikat dan distribusi kerja yang rasional. Susunan panitia tender melibatkan personel yang paham dan berkompeten.

Para terlapor yang berjumlah 20 orang terbukti melanggar Pasal 22 UU No 5/1999 yang mengatur persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan

pemenang tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Perusahaan yang dihukum adalah PT Enam Enam Group yang wajib bayar denda Rp 872,3 juta, PT Bahtera Mayori (Rp 826,2 juta), PT Esha Sigma Pratama (Rp 797,5 juta), PT Global Menara Berdikari (Rp 593,7 juta), PT Boyke Putra (Rp 353,2 juta), dan CV Vicpa (Rp 258,9 juta).

Selain itu, CV Sauli Jaya wajib membayar denda Rp 316,8 juta, CV UT Rahman (99,6 juta), CV Tri Jaya Teknik (57,6 juta), CV Fariqi (48,7 juta), PT Twink Indonesia (Rp 5,037 miliar), dan PT Tiga Pilar Sakato (Rp 5,748 miliar). Lainnya, PT Trafointo Prima Perkasa (Rp 851,9 juta) PT Sinarindo Wiranusa Elektrika (Rp5,64 miliar), PT Mega Kharrisma Makmur (Rp 781,5 juta), PT Citra Mahasurya Industries

(Rp 1,82 miliar), PT Kentjana Sakti Indonesia (Rp 176,7 juta).

Dalam proses pemeriksaan, majelis menemukan adanya persekongkolan horizontal para terlapor. Persekongkolan itu, misalnya, pertemuan untuk mengatur pembagian paket pekerjaan. Ada pula persesuaian dokumen penawaran di antara rekanan dalam bentuk kemiripan harga, dalam rekapitulasi daftar kuantitas dan harga. Bahkan, kesalahan pengetikan pun sama.

Majelis memberi kesempatan kepada para terlapor untuk mengajukan banding, paling lambat 14 hari setelah terlapor menerima salinan putusan.

Kuasa hukum salah satu terlapor, Rudolf Valentino, dari PT Tiga Pilar Sakato, se usai sidang mengatakan, pihaknya belum dapat menentukan sikap terkait keputusan majelis hakim. (WSI)

### DUGAAN PENIPUAN

## Perkuat Pengawasan Proyek Properti

YOGYAKARTA, KOMPAS — Terkait dugaan penipuan yang dilakukan perusahaan properti Majestic Land, pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta diminta memperkuat pengawasan terhadap proyek-proyek properti di provinsi tersebut. Selain untuk melindungi konsumen, pengawasan juga penting untuk menjaga citra Yogyakarta sebagai salah satu daerah tujuan investasi bidang properti.

"Pengawasan terhadap proyek-proyek properti harus diperkuat karena kita harus menjaga citra Yogyakarta sebagai daerah yang potensial untuk tujuan investasi dalam bidang properti," kata Wakil Ketua Lembaga Ombudsman DIY Mohammad Saleh Tjan, Jumat (5/2), di Kota Yogyakarta.

Seperti diberitakan, puluhan pembeli produk properti dari Majestic Land di DIY merasa ditipu manajemen perusahaan tersebut. Para konsumen sudah menyeter uang ratusan juta rupiah untuk membeli produk properti, misalnya apartemen, kondotel, dan vila, tetapi pembangunan properti yang dijanjikan ternyata berhenti di tengah jalan. Kantor Majestic Land di Yogyakarta tutup, sementara pimpinan perusahaan tak bisa ditemui, (*Kompas*, 5/2).

### Terima pengaduan

Saleh menjelaskan, Lembaga Ombudsman DIY telah menerima pengaduan dari korban. Sudah menerima pengaduan, Lembaga Ombudsman akan mengambil sejumlah langkah. Langkah pertama adalah meminta korban melapor ke Kepolisian Daerah DIY agar kasus tersebut diproses secara hukum. Kedua, Lembaga Ombudsman DIY akan menelusuri perizinan dan pengawasan proyek-proyek properti yang dikerjakan Majestic Land.

"Kami akan mengundang pihak terkait untuk mencari tahu apakah mekanisme perizinan proyek-proyek itu sudah sesuai dengan regulasi atau tidak. Kalau memang sudah ada izinnnya, akan kami cari tahu juga bagaimana pengawasan dari pemerintah kabupaten/kota sebagai pemberi izin," ucap Saleh.

Dia menambahkan, apabila pemerintah kabupaten/kota selaku pemberi izin proyek properti melakukan pengawasan dengan baik, seharusnya kasus penipuan semacam itu tidak terjadi. Oleh karena itu, ke depan, pengawasan terhadap proyek properti harus diperkuat. Apalagi, selama ini, banyak pengembang menawarkan properti di DIY dengan berbagai kemudahan dan hadiah, padahal belum tentu mereka telah menyelesaikan perizinan yang dibutuhkan.

"Kalau pemerintah kabupaten/kota melihat iklan properti yang bertebaran di mana-mana, seharusnya mereka tergerak mengecek apakah proyek yang diiklankan benar atau tidak," katanya.

### Tidak berizin

Berdasarkan data yang dihimpun *Kompas*, perusahaan Majestic Land setidaknya memiliki lima proyek properti di DIY. Kelima proyek itu adalah apartemen dan kondotel di Kabupaten Sleman, perumahan dan kompleks vila wisata di Kabupaten Bantul, serta apartemen di Kota Yogyakarta. Untuk apartemen dan kondotel, setiap proyek bisa terdiri atas ratusan unit dan sebagian telah terjual.

Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Heri Karyawan mengatakan, proyek apartemen Majestic Land di Yogyakarta belum mengantongi izin. Padahal, apartemen yang berlokasi di Kelurahan Timoho itu telah diiklankan kepada para konsumen. "Sampai sekarang, kami memang belum mengeluarkan izin pembangunan apartemen karena belum ada peraturan daerah tentang hal itu," ujarnya.

Salah seorang pembeli produk properti Majestic Land, Hasan Basri (37), menuturkan, sesudah kejadian tersebut, dirinya menjadi takut membeli properti lagi di DIY. Dia juga berharap, kasus itu bisa segera diselesaikan dan uang yang telah ia keluarkan bisa dikembalikan.

"Saya ingin beli satu unit vila di Bantul dan telah mengangsur Rp 150 juta, tetapi lalu ada masalah ini. Sekarang malah jadi takut untuk investasi ke properti lagi," katanya. (HRS)

### PENYAKIT MENULAR

## Penderita Bertambah, Cirebon KLB Difteri

CIREBON, KOMPAS — Jumlah penderita penyakit difteri di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, bertambah dan mencakup wilayah dua kecamatan. Penyakit infeksi menular yang menyerang saluran pernapasan atas tersebut kini ditetapkan sebagai kejadian luar biasa di Cirebon. Kasus difteri ini juga terdapat di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

"Penyebarannya lewat udara sangat cepat dan sudah memakan korban jiwa," ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon M Sofyan, Jumat (5/2), di Cirebon. Sebelumnya, dalam waktu sebulan, tiga anak kakak-beradik dari Blok Puhun, RT 006 RW 003, Desa Sampih, Kecamatan Susukanlebak, meninggal akibat difteri.

Menurut Sofyan, ada enam warga Cirebon, yang juga keluarga korban meninggal, masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Cirebon karena positif difteri. Salah seorang anak berasal dari Kecamatan Mundu. "Ada dua orang dari Mundu yang masih mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Mereka juga masih kerabat dengan korban yang meninggal," ujarnya.

Kasus difteri beberapa tahun terakhir tidak ditemukan di Cirebon. Pada 2013, berdasarkan data Dinas Kesehatan Cirebon, terdapat dua kasus difteri, dan seorang anak di Kecamatan Tengahtani meninggal akibat difteri. Dibandingkan dengan kasus tahun 2013, jumlah kasus dan korban jiwa akibat difteri saat ini melonjak.

Difteri disebabkan oleh infeksi bakteri *Corynebacterium diphtheriae*. Umumnya, bakteri ini berkembang di daerah beriklim sedang dan tropis. Penderita yang terinfeksi bakteri ini akan mengalami gejala antara lain demam, flu, pembengkakan pada leher, hingga terdapat selaput putih di tonsil yang menghambat pernapasan.

Selama ini, imunisasi dapat mengantisipasi penyakit yang banyak mengorbankan anak-anak tersebut. Kemarin, imunisasi ini dilakukan di Blok Puhun dan wilayah Mundu, Jumat pagi. Sekitar 30 anak di Blok Puhun diimunisasi.

"Cakupan imunisasi dasar di blok tersebut di bawah target, 85 persen. Kami akan terus memantau wilayah ini," ujar Sofyan.

Qomarudin (40), warga Blok Puhun, mengatakan, alasan warga tidak mengimunisasikan anaknya antara lain karena mendapat informasi tidak baik soal imunisasi. "Anak juga demam setelah diimunisasi," ujarnya.

Untuk mengantisipasi cakupan wilayah penyakit ini meluas, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon telah menginstruksikan ke setiap puskesmas untuk mengecek potensi penularan difteri di setiap wilayah. Obat pencegah penularan, seperti eritromisin, juga dibagikan kepada warga.

Untuk mengetahui sumber penyakit difteri, diperlukan pemeriksaan epidemiologi, seperti mengecek cara hidup bersih dan nutrisi warga. Para penderita juga diketahui tidak pernah ke luar desa dalam waktu dekat ini.

Menurut Sofyan, salah satu pemicu penyakit difteri, selain daya tahan tubuh yang rendah, juga permukiman padat penduduk. Difteri menyebar melalui udara.

### 17 penderita

Hingga kemarin sore, RSUD Gunung Jati merawat 17 orang yang positif difteri. "Sebanyak 10 pasien dari Kecamatan Susukanlebak, 3 dari Mundu, dan 4 dari Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka," ujar Heru Purwanto, Direktur Utama RSUD Gunung Jati.

Pasien masih dirawat di ruang isolasi anak serta ruangan khusus di unit gawat darurat. "Pasien harus diisolasi agar tidak terjadi penularan," ujar Heru.

Dia mengatakan, penyakit difteri seharusnya sudah tidak ada sejak puluhan tahun lalu saat imunisasi digagas. Ia berharap pemerintah daerah dan pusat menanggulangi penularan penyakit tersebut. Untuk itu, perlu diadakan deteksi dini difteri di daerah yang rendah cakupan imunisasinya melalui apus tenggorokan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka Gandana Purwana membenarkan, empat pasien positif difteri berasal dari Majalengka. "Kami akan mengecek ke lapangan," katanya. (IKI)



KOMPAS/GREGORIUS MAGNUS FINESSO

Sejumlah warga menonton penampakan seekor buaya muara (*Crocodylus porosus*) di tepian Sungai Ijo, Desa Nusadadi, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat (5/2). Kemunculan kawanan buaya di sekitar sungai itu sejak separakan lalu semakin meresahkan warga, terutama karena menghambat aktivitas nelayan ikan dan kerang. Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) masih mencari pemecahan masalah permanen terkait dengan satwa liar tersebut.

### SATWA LIAR

## Butuh Solusi Permanen Atasi Buaya Muara

PURWOKERTO, KOMPAS — Keberadaan kawanan buaya muara (*Crocodylus porosus*) di sekitar Sungai Ijo, Desa Nusadadi, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, semakin meresahkan warga. Aktivitas nelayan ikan dan nelayan kerang terhenti. Solusi permanen dibutuhkan untuk menangani masalah yang kerap muncul di wilayah selatan Jateng itu.

Pantauan *Kompas*, Jumat (5/2), menunjukkan, Sungai Ijo yang pada kondisi biasa ramai dilintasi nelayan untuk mencari ikan dan kerang terlihat sepi. Sejumlah warga berkumpul di tepian sungai untuk melihat kawanan buaya muncul di permukaan air.

Kepala Desa Nusadadi Ngalimin mengatakan, buaya yang sering terlihat sekitar empat ekor. Satu di antaranya memiliki panjang sekitar 3 meter. Buaya-buaya tersebut sering berjemur antara pukul 08.00 dan pukul 12.00 di sisi paling bawah tanggul Sungai Ijo. Kemudian muncul lagi pada sore hari. Pe-

mandangan rutin itu terlihat sepekan terakhir.

Keberadaan buaya di Sungai Ijo membuat pencari ikan dan kerang berhenti bekerja. Sungai tersebut juga dekat permukiman sehingga dikhawatirkan mengancam keselamatan warga.

Widodo Umar (44), nelayan, mengatakan, penghasilannya sepekan terakhir tidak menentu karena kesulitan mencari ikan. "Kami takut melintasi kawasan sekitar tempat buaya itu sering muncul. Padahal, saat ini sebenarnya masih masa panen ikan. Kami minta buaya-buaya itu segera ditangkap," ujarnya.

Sebelum muncul di Sungai Ijo, kawanan buaya juga sempat mengganggu aktivitas nelayan di Sungai Bodo, Desa Candirenggo, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, beberapa bulan lalu. Setelah itu juga sempat terlihat sejumlah kawanan buaya muara di bagian lain Sungai Ijo.

Sungai Ijo bermuara di Sungai Bodo yang jaraknya dari Nusadadi sekitar 3 kilometer. "Karena permukaan air sedang tinggi,

buaya-buaya itu bisa jadi pindah ke sini," kata Widodo.

Saat ini, lokasi tempat kawanan buaya itu sering muncul selalu ramai dikunjungi warga. Sebagian besar di antaranya datang dari luar Nusadadi. Ada pula yang bahkan memberi umpan burung atau ayam kecil untuk memangcing buaya menampakkan diri.

### Destinasi wisata

Terkait keberadaan buaya itu, Ngalimin berharap segera dilakukan penanganan yang tuntas. Di harapkan warga dapat segera menjalani aktivitas mencari ikan dan kerang di Sungai Ijo.

Jika buaya itu tidak dapat dipindahkan, Ngalimin mengusulkan untuk dibuat destinasi wisata sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Koordinator Polisi Hutan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah Seksi Konservasi II Cilacap-Pemalang, Rahmat Hidayat, membenarkan, kawanan buaya Sungai Ijo kemungkinan bermigrasi dari Sungai Bodo, Kebumen. (GRE)

### SATWA LANGKA

## Gajah Mati, Diduga Tersengat Listrik Pagar

PEKANBARU, KOMPAS — Kasus kematian gajah betina dewasa di pinggir hutan Talang Duri, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Rabu (3/2), diduga akibat tersengat aliran listrik. Dugaan itu didasarkan pada adanya luka hangus di bagian belalai gajah.

"Kami mendapat informasi, gajah itu tersengat listrik dari pagar kebun warga yang ada di lokasi dekat penemuan bangkai gajah," ujar juru bicara organisasi pemerhati satwa langka World Wildlife Fund (WWF) Riau, Syamsidar, saat dihubungi di Pekanbaru, Jumat (5/2).

Kepala Bidang II Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Supartono, yang dihubungi secara terpisah, tidak membenarkan, tetapi tidak pula membantah penyebab kematian gajah akibat sengatan listrik. Menurut dia, dipastikan penyebab kematian satwa itu masih menunggu hasil analisis laboratorium.

"Tim kami sudah melakukan nekropsi (otopsi) bangkai gajah itu di lapangan. Tim lain juga sudah menyusuri lokasi untuk menemukan sebab-sebab lain. Tim masih bekerja mengumpulkan informasi pelengkap. Setelah ada hasil analisis laboratorium, kami pasti akan sampaikan kepada publik," kata Supartono.

Syamsidar menambahkan, dari pengamatan lapangan di sekitar lokasi penemuan gajah mati, memang banyak areal kebun kelapa sawit warga yang dipagar dengan kawat berduri. Namun, belum diketahui pagar kebun mana yang dialiri listrik.

Ketua Himpunan Pegiat Alam Duri, organisasi yang mengkhususkan diri pada konservasi gajah di Duri, Zulhusni mengancam penggunaan aliran listrik di pagar kebun yang menyebabkan gajah mati. Apalagi kawasan perkebunan di sekitar lokasi itu merupakan Suaka Margasatwa Balai Raja yang diramabah menjadi kebun kelapa sawit.

"Kami meminta pemerintah agar segera melakukan penerbitan kawasan ini. Kalau tidak, konflik gajah dan manusia akan terus berlangsung dan akhirnya satwa itu yang akan punah," ujar Zulhusni.

Menurut Syamsidar, penggu-

naan listrik di wilayah konflik satwa dilindungi dengan manusia sebenarnya diperbolehkan meskipun dengan aturan ketat. Salah satu persyaratan wajib adalah penggunaan arus listrik tidak boleh dialiri secara langsung.

"Biasanya listrik yang digunakan untuk konflik satwa berasal dari sumber tenaga matahari yang sudah dimodifikasi sehingga tegangannya menjadi rendah. Apabila gajah atau satwa lain menyentuh listrik, itu hanya memberi efek kejutan yang sudah cukup untuk mengusir satwa dari lokasi itu," kata Syamsidar.

“

**Kami meminta pemerintah agar segera melakukan penertiban kawasan ini. Kalau tidak, konflik gajah dan manusia akan terus berlangsung dan akhirnya satwa itu yang akan punah.**

Zulhusni

Penggunaan listrik yang memberi efek kejutan sudah cukup untuk mengusir satwa yang cukup pintar seperti gajah. Ingatan gajah cukup kuat untuk tidak mendekati lokasi yang pernah memberi kejutan ke tubuhnya.

Penggunaan arus listrik tegangan tinggi yang mematikan gajah, kata Syamsidar, semestinya dapat menjadi dasar aparat hukum untuk memeriksa pagar kebun warga yang dialiri listrik. Tindakan itu dapat dikategorikan melanggar hukum karena gajah merupakan satwa yang dilindungi undang-undang.

Tentang kondisi Suaka Margasatwa Balai Raja yang sudah tidak mendukung daya hidup kawanan gajah, Syamsidar mengharapkan pemerintah segera mengembalikan kawasan itu sesuai fungsinya semula. Saat ini tidak ada ketegasan atau tindakan yang dilakukan terhadap perambah dan gajah yang tersisa. (SAH)